



**PERUSAHAAN MILITER SWASTA
DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNASIONAL:
STUDI KASUS *OPERATION ENDURING FREEDOM* DI AFGHANISTAN
TAHUN 2001-2010**

Claudia Syarifah

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The end of the Cold War marked the beginning of New War, where the war is no longer between state actors, but among the non-state actors, such as private military companies (PMC). PMC was established to accommodate the Cold War's veterans and the soldier who are out of contract or civilians to serve as mercenaries. This study is an initial attempt to investigate the use of PMC in Afghanistan and how it effects on Operation Enduring Freedom, the effort of the warlords in doing military privatization for the sake of financial interest, and how PMC could be actively involved in international armed conflicts and weaken the monopoly of force which is only owned by the state. The method of this study is descriptive and tend to use inductive analysis approach. Process and meaning more highlighted in this qualitative study. Marxism is used as foundation of the theory to guide this study in accordance with the facts available. This study shows how power, money, using democracy and freedom as disguise, and underlying motives is carrying out military activities in some countries. It also presents an overview of the benefits which PMC offered and the huge damages such offers had violated human rights.

Keywords: *private military companies (PMC), international armed conflict, Operation Enduring Freedom, Afghanistan, United State of America*

PENDAHULUAN

Jika dilihat dalam pengertian formal, perang yang dilancarkan AS dan sekutunya tersebut merupakan barang "lama", yakni yang disepakati sebagai perang antar negara (Kaldor, 2012: 2). Sebagaimana konsep perang bahwa sengketa bersenjata terjadi apabila unsur-unsur Angkatan Bersenjata negara yang sedang berlawanan dikerahkan secara sengaja dalam operasi militer untuk bertempur (Rogers, 1999: 25). Namun Jika diperhatikan secara seksama, Perang di Afghanistan bukan merupakan pertempuran terhadap tentara regular (yang merupakan salah satu dasar pembentuk suatu negara) tetapi terhadap para juragan perang Taliban, para anggota jaringan Al Qaeda dan para juragan perang lainnya (Seibert, 2005: 2). Pasalnya, terdapat kejanggalan sejak awal penyerbuan Amerika Serikat ke Afghanistan pada tahun 2001, atau dikenal sebagai '*Operation Enduring Freedom*' yang memiliki tujuan utama untuk menemukan Osama bin Laden, dan menumpas Taliban yang bersekutu dengan organisasi Al Qaeda, serta mencegah Afghanistan menjadi surga bagi para teroris (Pelton, 2007: 37).

PEMBAHASAN

Konsep Perang Baru

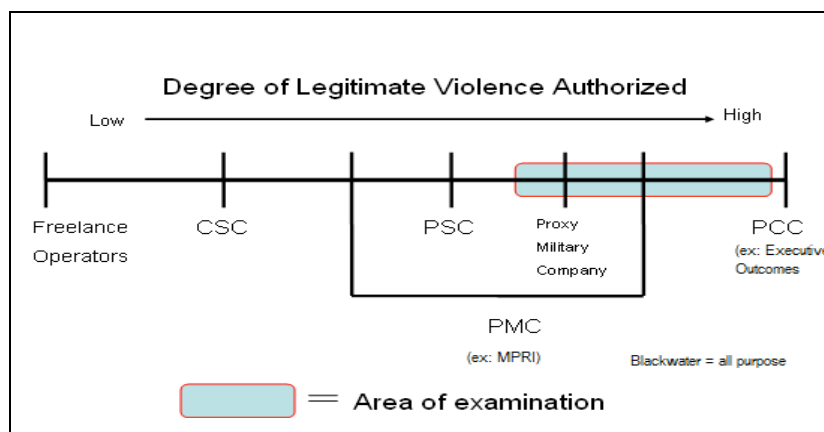
Mary Kaldor memperkenalkan konsep Perang Baru yang memiliki logika berbeda dari Perang Lama. Aktor dalam Perang Lama (perang konvensional) terdiri dari angkatan bersenjata reguler suatu negara. Sementara Perang Baru terdiri dari beragam kombinasi *state actor* dan *non-state actor*, misalkan tentara reguler, PMC atau mercenary, para jihadist, juragan perang (*warlords*), paramiliter, dan sebagainya. Dilihat dari tujuannya, Perang Lama bertujuan untuk kepentingan geo-politik atau untuk ideologi (demokrasi atau sosialisme). Tetapi, Perang Baru adalah peperangan yang mengatasnamakan identitas seperti etnis, suku atau agama. Identitas politik memiliki logika yang berbeda dari geo-politik atau ideologi. Tujuannya yakni untuk memperoleh akses terhadap negara untuk kelompok-kelompok tertentu (baik kelompok lokal ataupun transnasional) dan bukan untuk kepentingan publik. Meningkatnya identitas politik sejalan dengan kemajuan teknologi serta migrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang paling penting, identitas politik dikonstruksi melalui perang, mobilisasi identitas politik pada Perang Baru merupakan tujuan dari perang dan bukan instrumen perang sebagaimana dalam Perang Lama. Berdasarkan sumber pendanaannya, Perang Lama didanai oleh negara. Sementara Perang Baru sering kali pendanaan perang berasal dari pihak swasta termasuk hasil penjarahan, bantuan kemanusiaan, dukungan diaspora, penyelundupan minyak, penyelundupan permata, perdagangan senjata dan narkoba, dan lainnya.

Terdapat argumentasi bahwa Perang Baru didorong oleh motif ekonomi, tetapi cukup sulit untuk membedakan antara mana yang menggunakan *political violence* untuk alasan ekonomi atau kegiatan ekonomi untuk mendanai persoalan politik. Sementara itu, sistem perekonomian Perang Lama bersifat terpusat, swasembada, dan memobilisasi penduduk. Perang Baru, adalah bagian dari globalisasi dimana perekonomian bersifat desentralisasi, partisipasi penduduk rendah dan berorientasi pada keuntungan yang tergantung pada keberlangsungan kekerasan (Kaldor, 2013: 2-3).

Jenis-jenis PMC

Berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam perang, O'Brien menggolongkan perusahaan militer swasta modern ke dalam empat kategori: *private combat companies* (PCC), *private military companies* (PMC), *commercial security companies* (CSC), dan *freelance operators*. *Private military company* selanjutnya dibagi menjadi dua yakni *proxy military company* dan *private security company* (PSC).

Gambar: Degree of Legitimate Violence Authorized



Sumber: O'Brien, 2008: 4

Penelitian ini menggambarkan kapabilitas dan dampak dari privatisasi perang di zona tempur. *Proxy military company* merupakan perusahaan militer swasta yang bertindak sesuai dengan tujuan nasional bangsa yang memperkerjakannya. *Proxy Company* berpotensi menggunakan *direct force*, tetapi untuk aksi tersebut mereka selalu meminta izin dari pihak yang mempekerjakan. Hampir semua *proxy military company* tergolong ke dalam definisi PMC, tetapi tidak semua PMC tergolong sebagai *proxy forces*. Demikian pula, *private security company* merupakan jenis PMC, tetapi memiliki fungsi utama untuk melindungi, bukan bertempur. Penting untuk membedakan antara *private combat company* (PCC) dan *freelance operator*, terdapat batas-batas politik dan sosial yang membatasi pekerjaan keduanya. Executive Outcomes di Afrika menggambarkan sebuah PCC. Kategori *proxy military company* sendiri direpresentasikan oleh (*Military Profesional Resources Incorporate*) MPRI dan Blackwater dianggap sebagai prototipe “*all purpose*” PMC (O’Brien, 2008, 4-5).

Sean mengklasifikasikan personil perusahaan militer swasta yang bekerja untuk perusahaan Amerika Serikat ke dalam tiga jenis kategori: Pertama, warga negara Amerika Serikat, yang menurut ‘*Congressional Budget Office*’ jumlahnya terdiri dari 20 persen dari tenaga kerja kontraktor. Mereka umumnya mengisi posisi manajemen dan pekerjaan teknis, seperti teknisi atau legal servis yang memperoleh bayaran tertinggi. Kedua, tenaga kerja lokal atau warga negara setempat: warga negara di mana perusahaan bekerja (misalnya, warga Irak yang bekerja di Irak). Pekerja lokal biasanya melakukan berbagai tugas rutin, seperti mengemudi, mempersiapkan makanan dan sebagai penerjemah, mereka dikategorikan sebagai penerima bayaran terendah. Ketiga, warga negara dunia ketiga (*third- country nationals/ TCNs*), yang bukan warga Amerika Serikat atau pun warga setempat. TCNs berasal dari berbagai negara seperti India, Fiji, Ghana, Ekuador, Australia, Meksiko dan Afrika Selatan. Mereka biasanya tidak mengisi posisi manajemen yang penting dan hampir selalu dibayar lebih rendah dari warga Amerika Serikat, meskipun pekerjaan tersebut sejenis dan mereka bekerja berdampingan (McFate, 2011: 223).

PMC dari Segi Hukum Internasional

Penelitian Zoe Salzman yang berjudul “*Private Military Contractors and the Taint of a mercenary reputation*” (2013) berhasil menjawab perdebatan mengenai apakah perusahaan militer swasta dan personelnya harus diperlakukan sama seperti perusahaan transnasional lainnya, atau mereka harus diperlakukan seperti mercenary atas dasar hukum internasional. Keberadaan hukum internasional tentang mercenary (khususnya dalam *article 47* pada *Additional Protocol I* konvensi Jenewa) dapat diberlakukan terhadap beberapa militer swasta. Salzman menggambarkan bagaimana hukum nasional dan hukum internasional dapat meregulasi perusahaan militer swasta secara lebih baik. Karena itu, penting untuk mengenali dan memperhitungkan persamaan-persamaan antara perusahaan militer swasta dan mercenary (Salzman, 2013: 856)

Perlu digarisbawahi bahwa ketidakpercayaan publik terhadap mercenary sebagian berakar pada persepsi bahwa mereka melanggar monopoli negara atas penggunaan kekerasan. Penekanan pada monopoli kekerasan oleh negara menyebabkan kecaman masyarakat internasional terhadap mercenary dimulai pada tahun 1960, ketika *white mercenaries* yang dikenal sebagai “*Les Affreux*” berperang melawan dekolonisasi Afrika dan gerakan pembebasan. *Organization for African Unity* (OAU) menyusun Konvensi regional untuk Penghapusan mercenary di Afrika pada tahun 1972 (Konvensi OAU), dan pada tahun 1977 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional (Protokol I) dan melepaskan status mercenaries sebagai kombatan dan tawanan perang (*Prisoner of War*) (Salzman,

2013: 861). Terdapat beberapa kekhawatiran yang dimuat Salzman dalam tulisannya. Salah satunya, aktivitas perusahaan militer swasta melemahkan monopoli negara dalam hal penggunaan kekerasan. Secara historis pemahaman masyarakat tentang pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada gagasan bahwa keamanan adalah salah satu kewajiban esensial dari suatu pemerintah terhadap masyarakatnya.

Regulasi mengenai aktivitas mercenaries berkembang dengan pesat sejalan dengan diadopsinya definisi yang lebih luas mengenai “mercenary” pada tahun 1989 yakni ‘*International Convention Against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries*’. Seperti halnya mercenary, militer swasta juga merusak monopoli kolektif negara terhadap kekerasan. Perbedaannya militer swasta sejauh ini lolos dari jeratan hukum internasional. Salah satu alasan utamanya adalah perusahaan militer swasta dimiliki oleh negara (pengusahanya adalah negara itu sendiri). Akibatnya, militer swasta digambarkan sebagai benteng sistem negara-negara terhadap destabilisasi, bukan sebagai ancaman bagi negara atas monopoli kekuatan yang dimilikinya. Beberapa sarjana berpendapat bahwa selama kontraktor swasta dipekerjakan oleh sebuah negara, mereka dapat dipahami sebagai “*a type of state agent*”.

Singkatnya, karena pasar perusahaan militer swasta tidak diatur, perusahaan dapat bekerja untuk siapa saja yang mereka pilih. Seperti bisnis pada umumnya perusahaan militer swasta dapat menjual jasa mereka kepada siapapun. Bedanya tidak seperti bisnis lainnya, bisnis perusahaan militer swasta terlibat dalam menjual penggunaan kekerasan. Akibatnya, dengan menciptakan pasar untuk kekerasan, mereka secara efektif menghentikan monopoli negara dalam penggunaan kekerasan. Protokol I menunjukkan bahwa setidaknya beberapa perusahaan militer swasta dapat memenuhi syarat sebagai mercenary di bawah empat kriteria utama dari definisi Protokol I: Pertama, perusahaan militer swasta dapat dianggap telah direkrut secara khusus. Kedua, militer swasta sering berpartisipasi langsung dalam konflik. Ketiga personil perusahaan militer swasta terkadang memenuhi persyaratan kewarganegaraan asing. Keempat, perusahaan militer swasta bahkan lebih mungkin untuk memenuhi persyaratan ‘motivasi keuangan’ dibandingkan mercenary tradisional.

Sementara itu, terdapat beberapa argumentasi bahwa terdapat dua perbedaan yang tegas antara mercenary dan militer swasta: Pertama, perusahaan militer swasta tidak dapat dianggap mercenary karena mereka memiliki struktur perusahaan, tidak ada aturan dalam hukum internasional mengenai perusahaan militer swasta, sebagaimana hukum yang tertulis mengatur mercenary sebagai ‘individu-individu’. Kedua, perusahaan militer swasta tidak dapat dianggap mercenary karena mereka dipekerjakan secara sah oleh negara, sehingga tidak mungkin mengancam kedaulatan negara ataupun hak masyarakat untuk bebas menentukan nasib sendiri dan karena mereka telah membatasi kontrak mereka untuk bekerja pada rezim yang sah (Salzman, 2013: 888).

Pada akhirnya, Salzman menjawab beberapa argumentasi tersebut: Pertama, perusahaan militer swasta tidak dapat dibedakan dari mercenary sekalipun memiliki struktur perusahaan. Hukum yang melekat pada mercenary menunjukkan bahwa diperbolehkan menahan personel perusahaan militer swasta untuk bertanggung jawab sebagai individu berdasarkan hukum yang ada. Fakta bahwa mereka adalah karyawan sebuah perusahaan sekalipun tidak mempengaruhi penerapan hukum mercenary, karena tidak ada indikasi bahwa kekhawatiran yang mendasari dibentuknya hukum mercenary mampu dihilangkan setelah mercenary diorganisir ke dalam suatu perusahaan. Kedua, sekalipun perusahaan militer swasta dipekerjakan oleh negara bukan berarti mendapat pengecualian sehingga tidak dijerat *anti-mercenary*.

Faktanya sering kali perusahaan militer swasta tidak hanya bekerja untuk negara. Mereka juga bekerja untuk kelompok teroris, kartel narkoba atau juga menjaga aset-aset

swasta. Protokol I dan *Convention Against Mercenaries* melawan hal ini dan mencegah penggunaan mercenary. Protokol I hanya berlaku bagi sengketa bersenjata internasional, yang melibatkan dua atau lebih negara yang terlibat dalam sengketa. Akibatnya secara langsung menargetkan penggunaan mercenary oleh negara. Sementara '*Convention Against Mercenaries*', secara spesifik melarang negara-negara untuk merekrut, menggunakan, membiayai atau melatih mercenary. Jadi, bahkan jika pernyataan bahwa perusahaan militer swasta hanya berkerja untuk negara dianggap akurat, ini tidak akan membebaskan tindakan mereka dari sanksi internasional tentang *anti-mercenary* yang secara spesifik menargetkan negara yang mempekerjakannya (Salzman, 2013: 890).

Proses Kontrak PMC

PMC mendapatkan kontrak dari Pemerintah Federal melalui proses yang diformalisir oleh FAR. Melalui peraturan tersebut, sebuah badan pemerintah akan menentukan bahwa negara memiliki kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh personil yang ada, atau akan lebih baik jika kebutuhan tersebut dapat diisi oleh perusahaan luar. Badan ini kemudian melakukan permintaan proposal (*Request For Proposal/RFP*) dan keterangan kerja (*Statement of Work/ SOW*), yang memuat rincian secara persis mengenai pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor. RFP tersebut kemudian dibuat berdasarkan perspektif penawar, biasanya diberikan batas waktu selama tiga puluh hari untuk mengajukan tawaran kontrak (dalam keadaan tertentu batas waktu tiga puluh hari dibebaskan, dan kontrak dapat diberikan tanpa proses tawar-menawar). Setelah kontrak diberikan untuk perusahaan oleh pihak petugas perwakilan yang menjadi penghubung antara pemerintah dan perusahaan. Selama proses penawaran, petugas kontrak akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam membuat keputusan, dan belum tentu selalu memilih perusahaan yang menawarkan harga terendah. Tetapi, sejumlah sumber daya yang tersedia, termasuk *track record* kontraktor ketika dulu dipekerjakan oleh pemerintah AS dipakai sebagai faktor pertimbangan (Jorgensen, 2005: 62).

Keterlibatan PMC dalam Operation Enduring Freedom di Afghanistan

Operation Enduring Freedom pada dasarnya tidak memiliki batasan wilayah maupun batasan waktu dan merupakan operasi militer untuk menghadapi musuh-musuh lama AS serta negara atau komunitas yang berpotensi menjadi musuh AS (Seibert, 2005: 2). Ini sebabnya operasi militer dalam rangka *Operation Enduring Freedom* di Afghanistan juga berlangsung di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Afghanistan. Departemen pertahanan memiliki obligasi sekitar \$11,8 juta pada kontrak dalam operasi Afghanistan di tahun 2010, yang mewakili 15 % dari total obligasi di daerah *Operation Enduring Freedom* Afghanistan. Dari tahun 2005-2010, Departemen Pertahanan memiliki obligasi sekitar \$33,9 juta pada kontrak terutama di Afghanistan, yang mewakili 16 % dari total obligasi Departemen Pertahanan untuk operasi di daerah-daerah tersebut (Schwartz, 2013: 13). PMC dipekerjakan oleh AS untuk melayani kepentingannya dalam *Operation Enduring Freedom* di Afghanistan. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan PMC, tetapi mereka memiliki karakteristik negatif yang tidak dapat dipisahkan sehingga membahayakan *counterinsurgency*.

Keuntungan Menggunakan PMC

Kebijakan yang Fleksibel

PMC dapat dengan cepat merekrut para calon personelnya baik di AS maupun di negara dunia ketiga untuk disebar di Afghanistan Kombinasi kecepatan dan profil politik yang rendah menjadikan PMC sebagai pilihan yang menarik untuk menyediakan sumber daya yang tidak dapat pemerintah sediakan (Benicsak, 2009: 8).

Kontinuitas

Kontinuitas merupakan keuntungan terbesar kedua. Di saat militer AS memiliki kebijakan untuk merotasi personel militer mereka setiap enam sampai 12 bulan, personel militer swasta bersedia untuk tinggal lebih lama. Biasanya perusahaan menawarkan bonus yang signifikan untuk personel yang bersedia dikontrak lebih lama. Hal ini membuat perusahaan militer swasta menuai keuntungan yang sepadan (Hammes, 2010: 2).

Mengurangi Korban Militer Reguler

Para personel PMC terbukti mengurangi korban militer. Pada akhir 2009, dilaporkan hampir 1.800 personel PMC tewas dan 40.000 personel terluka di Irak dan Afghanistan. Ketika pertempuran di Afghanistan memburuk, personel PMC menderita lebih banyak kematian dibandingkan pasukan AS: “Dalam dua kuartal pertama 2010 saja, kematian personel PMC mewakili lebih dari setengah (53%) dari semua kematian. Sejak Januari 2010, jumlah personel PMC yang tewas di Irak dan Afghanistan lebih banyak dari jumlah tentara militer AS yang tewas (Schooner and Swan, September 2010, 17). Secara administrasi, personel PMC yang menjadi korban perang tidak dilaporkan melalui Pentagon, tetapi hanya melalui Departemen Tenaga Kerja AS. Situs Web mencatat statistik mereka yang cedera dan tewas untuk proses claim asuransi. Namun, sering kali tidak komprehensif sehingga sulit untuk menentukan berapa banyak personel PMC yang menjadi korban baik di Afghanistan atau di negara lain.

Meningkatkan Kekuatan Tempur

Penggunaan PMC, baik bersenjata dan tidak bersenjata, diperlukan untuk cadangan atau peningkatan kekuatan dalam Angkatan Darat atau Angkatan Laut. Akibatnya, mobilisasi militer swasta diperbolehkan Amerika Serikat untuk terlibat dalam konflik tanpa meyakinkan masyarakat AS tentang perlunya peningkatan jumlah Angkatan Bersenjata Aktif. Keputusan untuk menyewa PMC dapat diambil dari pandangan publik sementara keputusan untuk meningkatkan kekuatan pasukan biasanya melalui perdebatan sengit. Penentang PMC menunjukkan bahwa hal ini mempermudah para pemimpin politik AS untuk berkomitmen berlarut-larut dalam konflik karena keberadaan PMC dapat mengurangi jumlah korban tentara reguler (Isenberg, 2009: 5).

Efisiensi Biaya

Negara memiliki kewajiban untuk menanggung kehidupan bagi keluarga tentara AS yang tewas dalam tugas. Tetapi kalau mereka melakukan *outsourcing*, maka negara tidak punya kewajiban atas hal tersebut. Jadi, meskipun bukan atas nama negara (AS), tetapi dengan menggunakan pihak swasta maka AS tetap bisa memegang komando dan pengaruh di suatu negara atau kawasan.

Efek Negatif PMC

Dalam zona konflik, terutama selama *counterinsurgency*, PMC membuat sejumlah masalah yang signifikan mulai masalah taktis hingga strategis. Tiga karakteristik yang melekat dari PMC menciptakan masalah bagi pemerintah. Pertama, pemerintah tidak dapat mengontrol kualitas personel yang dipekerjakan. Kedua pemerintah tidak dapat mengontrol, bahkan tidak mengetahui tentang interaksi sehari-hari para personel PMC dengan penduduk setempat.

Kurangnya Kontrol

Pada kenyataannya, hampir tidak mungkin untuk menentukan efektivitas dari setiap personel PMC yang bersenjata atau yang tidak bersenjata hingga ketika mereka beroperasi di medan perang. Berbagai masalah yang dibuat PMC disebabkan oleh kurangnya kontrol terhadap kualitas mereka. Pemerintah tidak mungkin mengontrol aktivitas rutin sehari-hari antara personel PMC dengan penduduk. Kendati upaya pengawasan pemerintah terhadap PMC selalu ditingkatkan. Jumlah personel militer AS tidak cukup untuk mengimbangi jumlah personel PMC. Kurangnya kontrol dapat kita lihat melalui insiden *bullying*, pelecehan, intimidasi, dan bahkan pembunuhan warga sipil lokal seperti yang dilakukan karyawan DynCorp berupa pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penembakan oleh Blackwater (Hammas, *Strategic Forum National Defense University*, November 2010: 5).

Melemahkan Monopoli Pemerintah

Kemunculan PMC sebagai salah satu pelaku perang merepresentasikan bahwa negara-bangsa telah kehilangan kendali mereka atas terjadinya kekerasan. Negara memunculkan aktor kekerasan swasta melalui para juragan perang atau personel militer yang disediakan oleh PMC sebagai pemasok mesin perang.

Kecemburuan

Pada bulan Januari tahun 2010, Mayor Jenderal Michael Ward, Wakil Komandan Polisi Pelatihan NATO Misi Afghanistan, menyatakan bahwa pemerintah Afghanistan sedang mempertimbangkan pembatasan gaji PMC karena mereka membuat cemburu pasukan keamanan Afghanistan. Jenderal Carter mengatakan kepada wartawan bahwa PMC dibayar banyak lebih dari pasukan keamanan Afghanistan (Major General Nick Carter, 26 May 2010). Tentu hal ini menjadi godaan berat bagi *Afghan National Police* (ANP) untuk pindah dan bergabung ke sebuah PMC dimana mereka mendapat bayaran ganda.

Ketergantungan

Di Afghanistan orang-orang berpendidikan dan profesional lebih memilih untuk bekerja menjadi bagian dari PMC daripada bekerja untuk negara mereka sendiri, Jumlah gaji yang diberikan oleh pemerintah sangat sedikit bila dibandingkan dengan yang diberikan oleh PMC. Akibatnya, ISAF menimbulkan sebuah fenomena yang disebut sebagai "brain drain". *Brain drain* menjadi perhatian khusus di Afghanistan dimana jumlah sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas mulai terbatas sehingga menjadi kendala bagi pemerintah.

Perkembangan Kejahatan Lain

Berdasarkan wawancara Boris Kanzleiter dengan Dr. Martin Baraki (Kanzleiter, 2005: 156) terdapat beberapa kejahatan yang menjadi sumber pendapatan para juragan perang di Afghanistan: Pertama, perdagangan senjata dan narkoba. Kedua, cukai dan pendapatan dari perdagangan. Para juragan perang merebut cukai dan pendapatan dari pemerintah. Ketiga, bantuan dari lembaga internasional tidak didistribusikan secara langsung kepada rakyat Afghanistan yang membutuhkan, tetapi melalui masing-masing juragan perang yang menguasai wilayah Afghanistan.

PENUTUP

Paradigma perang masa kini telah mengalami pergeseran dari perang konvensional menjadi non-konvensional. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa perang bukan lagi antar negara, kekuatan tempur yang dulunya berisi barisan pasukan tentara reguler

berangsur-angsur disisipi oleh pasukan *private military companies* (PMC). Amerika Serikat mempergunakan PMC dalam *Operation Enduring Freedom* di Afghanistan berdasarkan berbagai pertimbangan seperti kemudahan perekrutan dan efisiensi biaya. Tidak menjadi masalah jika PMC hanya terlibat dalam bantuan logistik, yang menjadi masalah adalah ketika PMC terlibat secara aktif dalam pertempuran dan melanggar peraturan perang, seperti menculik dan memperkosa, menyerang instalasi sipil, instalasi pendidikan dan kesehatan, serta terlibat dalam jaringan kejahatan. Hal ini tidak sejalan dengan upaya *counterinsurgency* dan mengancam hak asasi manusia.

Hukum tentang PMC tergantung pada konteks kepentingan dan kebijakan pertahanan, yang di setiap negara tentunya beragam, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Amerika Serikat tergolong sebagai negara yang melegalkan PMC. Dalam konteks *Operation Enduring Freedom* di Afghanistan, keterlibatan beberapa pejabat Pentagon dan para juragan perang dalam pendirian PMC mengindikasikan komersialisasi perang di era kapitalisme ini. Selama perang berlangsung, para pelaku bisnis perang membangun jaringan-jaringan informal yang mengikis kekuasaan institusi negara dan berupaya melestarikan lingkaran kekerasan demi keuntungan ekonomi. Keberadaan PMC merupakan bentuk ketidakberdayaan negara dalam memonopoli kekerasan (*powerlessness of the powerful*).

Konsep *just war* dalam hukum humaniter internasional sebagai penanda perkembangan peradaban manusia dihancurkan oleh para aktor kekerasan swasta dengan memanfaatkan globalisasi atas nama demokrasi dan kebebasan. Dengan membiarkan perang non-konvensional atau “perang baru” berlangsung artinya kita membalik alur evolusi dan kembali ke perang jahiliyah yang tidak mengindahkan perikemanusiaan.

Referensi

- Azzellini, Dario, et. al. (2007). *La Empresa Guerra: Bisnis Perang dan Kapitalisme Global*: Insist Press.
- Avant, D. Deborah. (2005). *The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security*. Cambridge University Press.
- Burchill, Scott., et.al. (2005). *Theories of International Relations Third Editions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dinstein, Yoram. (2005) *War, Agression and Self-Defense*: Cambridge University Press.
- FAR Regulation*. (n.d.). diambil kembali dari <https://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%2011.t.html#wp1130776>
- Jackson, Robert., & Georg Sorensen (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (5th ed). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- McFate, Sean. (2011). *Durable Disorder: The Return of Private Armies and The Emergence of Neomedievalism*.
- O’Brien, James M. (2008). *Private Military Companies: An Assessment*.
- Pelton, R. (2006). *Licensed to Kill*. New York: Crown Publisher.
- Rogers, Anthony P.V. (1999). *Fight it Right*. Dialih bahasakan oleh Fadillah Agus. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- S, Nasution. (2007). *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Scahill, Jeremy. (2007). *Blackwater; Rise of the World Most Powerfull Mercenary Army*. New York: Nation Books.
- W. Mansbach, Richard; L. Rafferty, Kirsten. (2008). *Introductions to Global Politics*. London and New York: Routledge.
- Wolff, Jonathan. (2000). *Why Read Marx Today?*. New York: Oxford University Press.

- International Committee of the Red Cross. (2008). "Armed Conflict ." *Opinion Paper*. ICRC.
- United Nations. (2013). *United Nations Summary Report of the Expert Panel on the Use of Private Militaries and Security Companies*. New York: United Nations.
- Beniscak, Peter. (2009). *Advantages and disadvantages of Private Military Companies*
- Boot, M. (2009, May-June). *The Mercenary Debate: Three Views- Mercenaries are inevitable and, if employed wisely, can be effective adjuncts of U.S Policy*. American Interest, 4.
- Forsberg, C., & Kagan, K. (2010, May 28). *Consolidating Private Security Companies in South Afghanistan*. Diambil kembali dari Institute for the Study of War: www.understandingwar.org/files/BackgroundunderPSC.pdf.
- Giustozzi, A. (2007). *The Privatizing of War and Security in Afghanistan: Future or Dead End*. *The Economies of Peace and Security Journal*, 2.
- Hammes, T.X. (2010, November). *Private Contractors in Conflict Zones: The Good, the Bad, and the Strategic Impact*. Diambil dari Strategic Forum National Defense University.
- Harvey, David. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hill, N. (2008). *Military Contracting- Too Much Dependence?*. Strategy Research Project, U.S. Army War College.
- Isenberg, D. (n.d.). *Private Military Contractors and U.S. Grand Strategy*. International Peace Research Institute.
- Jessop, Bob. (2002). "Liberalism, Neoliberalism and Urban Governance: A state theoretical perspective," *Antipode*
- Kaldor, Mary. (2014). *In defence of new wars*. Stability: International Journal of Security and Development. LSE
- Krahmann, Elke. (2005). "Challenging international law: a dilemma of private security companies," *Conflict, Security & Development*.
- Nagan, Winston, and Craig Hammer. (2008). "The Rise of Outsourcing in Modern Warfare: Sovereign Power, Private Military Actors, and the Constitutive Process," *Marine Law Review*.
- Neocleous, Mark. (2008). *Critique of Security*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Paul, A. Barran. http://www.docstoc.com/docs/6492981/Paul_A_Barran.
- Salzman, Zoe. (2008). *Private Military Contractors and the Taint of a Mercenary Reputation*. *NYU Journal of International Law and Politics*.
- Vladimir, Lennin. http://www.docstoc.com/docs/30537526/Vladimir_Lennin.
- Afghan Leader to Ban Security Contractors*. (2010, Agustus 16). Diambil kembali dari www.cbsnews.com/stories/2010/08/16/world/main6776999.shtml
- After the September Eleventh Terrorist attacks on America, "It's time for war, Bush and Blair tell Taliban- We're ready to go in- Planes shot at over Kabul"*. (n.d.). Diambil kembali dari www.guardian.co.uk: <http://www.guardian.co.uk/world/2001/okt/07/politics.september11>
- Blackwater USA, <http://www.blackwaterusa.com/>.
- Control PMC. <http://controlpmc.org/corporate-private-armies-in-afghanistan-post-2014/>
- Cost of War in Iraq and Afghanistan*. (2009, Oktober 21). Diambil kembali dari The Nation.
- DynCorp, <http://www.dyncorp.com/>
- European Union External Action Service. www.eeas.europa.eu
- Falshoods in Iraq Shooting Unpunished*. (2009, April 2). Diambil kembali dari USA Today. [com/2010/06/06/world/asia/06warlords.html](http://www.usatoday.com/2010/06/06/world/asia/06warlords.html)>.

- High cost, low odds.* (2010, Juni 20). Diambil kembali dari BBC News.
- Isenberg, David. (2008, June 13). *Dog of War: Two Little Words*. Diambil kembali dari United Press International.
- Jeremy, Schill. (2009, August 31). *We need a special prosecutor for Blackwater and other CIA "contractors"*. Diambil kembali dari www.antiwar.com.
- Kellogg, Brown, & Root (KBR), <http://www.halliburton.com/kbr/index.jsp>
- Rumsfeld, D. (2002, Juni). *Transforming the Military*. Diambil kembali dari Foreign Affairs
- S, Walt. *'High cost, low odds'*, (2010, June 20). Diambil kembali dari BBC.
- Schooner, Steven L; Swan, Colin D. (2010, September). *Contractors and the ultimate Sacrifice*. Diambil kembali dari Service Contractor.
- Schwellenbach, N. (2009, April 1). *Fraud Cases Fell While Pentagon Contracts Surged: Procurement Experts Say More Investigators Are Required*. Diambil kembali dari Center for Public Integrity: <http://www.publicintegrity.org/articles/entry/1243>
- Singer, Peter. (2007, October). *The Dark Truth About Blackwater*. Diambil kembali dari Salon.
- The Center for Public Integrity.(<http://www.publicintegrity.org/>).
- United Nations. (n.d.). *Chapter 7, Articles 42-43*. Diambil kembali dari Charter of United Nations.: <http://www.un.org/aboutun/charter/chapter7.htm>